

**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN LAPANGAN KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**  
**KELAS I BATAM**



**Oleh :**

**Kelompok 1**

<b>Raib Sekhudin</b>	<b>101414353002</b>
<b>Kiki Sanjaya</b>	<b>101414353007</b>
<b>Ruth Angraeni Anike Wijaya</b>	<b>101414353015</b>
<b>Riska Dwi Milawati</b>	<b>101414353017</b>
<b>M. Fadly Kaliky</b>	<b>101414353020</b>

**PROGRAM MAGISTER KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan kesehatan saat ini semakin kompleks hal ini sejalan dengan adanya perkembangan teknologi transportasi. Dengan perkembangan teknologi transportasi yang semakin maju menyebabkan semakin cepatnya waktu tempuh antar negara. Waktu tempuh yang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit dapat memperbesar resiko masuk dan keluarnya penyakit menular ( *New Emerging Infectious Disiases, Emerging Infectious Disiases dan Reemerging Infectious Disiases* ), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis belum nampak peningkatan faktor resiko penyakit dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi kemajuan diberbagai bidang.

Hal tersebut menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua yang lain yang bisa disebabkan karna pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas.

Kantor kesehatan pelabuhan (KKP) mempunyai wilayah yang memiliki karakteristik dari lintas batas darat, untuk memantau jalur keluar masuknya kapal maupun bus dari wilayah negara ke wilayah negara yang lain, wilayah pelabuhan, bandara dan lintas batas darat berpotensi menghasilkan limbah padat, cair maupun gas, yang berasal dari kapal pesawat alat angkut darat lainnya. Selain itu semua alat angkut berpotensi menghasilkan media pembawa penyakit dari suatu negara ke negara yang lain dengan demikian pelabuhan merupakan tempat atau menjadi insvestasi dan rawan gangguan vektor dan serangga penularan penyakit.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam salah satu KKP yang ada di Indonesia dan memiliki wilayah kerja yang sangat spesifik diantara KKP lainnya, dikarenakan wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan negara

Singapore. Mobilitas yang terjadi sangat tinggi karena jalur lautnya merupakan jalur internasional, dan Batam merupakan daerah transit, hal ini berpengaruh terhadap tingginya risiko penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, mempelajari sistem kerja dan manajemen pengendalian risiko penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana sejarah terbentuknya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)?
- b. Bagaimana profil singkat tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam?
- c. Apa saja program kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam?
- d. Apa saja program unggulan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam?

## **1.3 Tujuan**

- a. Mengetahui sejarah terbentuknya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- b. Mengetahui profil singkat tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam.
- c. Mengetahui program kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam.
- d. Mengetahui program unggulan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam.

## **BAB II**

### **METODE KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Lokasi dan Waktu Kunjungan**

##### **2.1.1 Lokasi Kunjungan**

Kunjungan lapangan ini dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam yang berlokasi di Jalan Lumba-Lumba No. 5 Batu Ampar Batam.

##### **2.1.2 Waktu Kunjungan**

Kunjungan ini dilakukan pada hari Senin - Selasa, 7-8 September 2015.

#### **2.2 Agenda Kegiatan**

Adapun agenda kegiatan kunjungan lapangan yang akan dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, meliputi :

1. Perkenalan peserta dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan sambutan selamat datang dari pihak KKP.
2. Mempelajari tentang profil Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan.
3. Mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.
4. Diskusi dan tanya jawab mahasiswa dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam Kelas I.

#### **2.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Peserta kunjungan lapangan mempelajari kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dengan cara melakukan pengamatan langsung dan melalui pemaparan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam. Kemudian melakukan sesi tanya jawab dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.

Data yang diperoleh selama kunjungan kemudian dibuat laporan kunjungan lapangan dan dilakukan pembahasan untuk selanjutnya di seminarkan dihadapan dosen pembimbing KKL.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sejarah Terbentuknya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada awal mulanya berasal dari suatu kegiatan yang disebut karantina, yang berasal dari bahasa latin yaitu *Quadragesima* yang berarti 40. Kegiatan karantina ini dilakukan pada semua penderita penyakit menular baik yang masuk ke suatu negara selama 40 hari.

Pada tahun 1348 lebih dari 60 juta orang penduduk dunia meninggal karena penyakit Pes (Black Death). Pada tahun yang sama Pelabuhan Venesia sebagai salah satu pelabuhan yang terbesar di Eropa melakukan upaya karantina dengan cara menolak masuknya kapal yang datang dan daerah terjangkau Pes serta terhadap kapal yang dicurigai terjangkau penyakit Pes (*Plague*).

Pada tahun 1377 di roguasa dibuat suatu peraturan bahwa penumpang dari daerah terjangkau penyakit Pes harus tinggal di suatu tempat diluar pelabuhan dan tinggal di sana selama 2 (dua) bulan agar bebas dari penyakit. Itulah sejarah tindakan karantina dalam bentuk isolasi pertama kali dilakukan terhadap manusia. Pada tahun 1383 di Marseille, Perancis ditetapkan UU karantina yang pertama dan didirikan station karantina yang pertama. Akan tetapi, peran dari tikus dan pinjal belum diketahui dalam penularan penyakit Pes pada waktu itu.

Sedangkan di Indonesia sendiri kegiatan karantina mulai dilakukan setelah penyakit Pes mulai memasuki negara Indonesia pada tahun 1911 melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian mulai masuk juga melalui pelabuhan lain yaitu Pelabuhan Semarang pada tahun 1916, dan pelabuhan Cirebon pada tahun 1923. Pada saat itu Indonesia masih hidup dalam zaman kolonial Belanda. Regulasi yang diberlakukan adalah Quarantine Ordonanti (Staatsblad nomor 277 tahun 1911). Dalam perjalanan sejarahnya Quarantine Ordonanti telah berulang kali diubah. Penanganan

kesehatan di pelabuhan di laksanakan oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) dibawah Haven Master (Syah bandar). Pada saat itu di Indonesia hanya ada 2 Haven Arts yaitu di Pulau Rubiah di Sabang dan Pulau Onrust di Teluk Jakarta.

Pada masa kemerdekaan, sekitar tahun 1949/1950 oleh Pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan Karantina, yaitu Pelabuhan Karantina Klas I yaitu Tanjung Priok dan Sabang, Pelabuhan Karantina Klas II yaitu Surabaya dan Semarang, Pelabuhan Karantina Klas III di Cilacap. Pada masa inilah pemerintah Republik Indonesia mulai memberikan peran resmi dalam kesehatan pelabuhan.

Pada tahun 1959 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1959 tentang penyakit karantina. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Pasal 4 dan 6 sub 3 undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan (UU nomor 9 tahun 1960, lembaran negara tahun 1960 nomor 131) terlahirlah undang-undang nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara.

Pada tahun 1970 terbit Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1025/DD/ Menkes, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) & Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Baik DKPL maupun DKPU berbentuk non eselon dengan jumlah 60 DKPL dan 12 DKPU. Kegiatan DKPL dan DKPU baik teknis maupun administratif dilakukan secara terpisah walaupun masih dalam satu wilayah kerja.

SK Menkes Nomor 147/Menkes/IV/78, DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pembinaan teknisnya berada di bawah Bidang Desnban Kantor Wilayah Depkes dimana pimpinan KKP adalah eselon IIIB. Berdasarkan SK Menkes Nomor 147/Menkes/IV/78 jumlah KKP terdiri dari 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Kemudian terbit SK Menkes 630/Menkes/SK/XII/85, yang menggantikan SK No.147 (Eselon KKP sama IIIB), dimana jumlah KKP berubah menjadi 46 yang terdiri dari 10 KKP Kelas A dan 36 KKP Kelas B (ditambah Dili dan Bengkulu).

Sejak penerapan undang-undang otonomi daerah, otoritas kesehatan ditingkat provinsi yang bernama Kanwil Depkes harus dilebur ke dalam struktur Dinas Kesehatan provinsi. Peraturan Pemerintah tentang pembagian kewenangan mengamanatkan bahwa kekarantinaan sebagai wewenang pemerintah pusat.

Tahun 2004 terbit SK Menkes No. 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP yang baru. KKP digolongkan menjadi:

- a. KKP Kelas I (eselon II B) terdiri dari 2 KKP
- b. KKP Kelas II (eselon III A) terdiri dari 14 KKP
- c. KKP Kelas III (eselon III B) terdiri dari 29 KKP

Pada tahun 2007 dilakukan revisi terhadap SK Menkes No. 265/Menkes/SK/III/2004 tentang organisasi dan tata kerja KKP melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 167/Menkes/Per/II/2007. Dengan terbitnya Permenkes tersebut, maka terdapat 3 (tiga) penambahan jumlah KKP baru, yaitu KKP Kelas III Gorontalo, KKP Kelas III Ternate, dan KKP Kelas III Sabang.

Pada tahun 2008 dilakukan lagi revisi sekaligus mencabut Permenkes 265 tahun 2004 dengan Permenkes 356/Menkes/Per/IV/2008. Sejak berlakunya peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 juga telah mengalami perubahan sebagian isinya melalui Permenkes nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011. Dalam perubahan tersebut jumlah KKP menjadi 49 dengan rincian sebagai berikut:

- a. KKP Kelas I sebanyak 7 (tujuh) KKP
- b. KKP Kelas II sebanyak 21 (dua puluh satu) KKP
- c. KKP Kelas III sebanyak 20 (dua puluh) KKP
- d. KKP Kelas IV sebanyak 1 (satu) KKP

### **3.2 Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam**

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam merupakan salah satu KKP yang terdapat di Kepulauan Riau yang beralamatkan di Jalan

Lumba-lumba nomor 5, Batu Ampar, Batam, nomor Telepon (0778) 412532, dan Fax (0778) 412469. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sendiri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Adapun visi dan misi dari KKP Kelas I Batam adalah sebagai berikut.

### **3.1.1 Visi**

Visi KKP Kelas I Batam adalah:

“Pelabuhan Laut dan Bandara di Batam Sehat sebagai bagian mewujudkan Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan.”

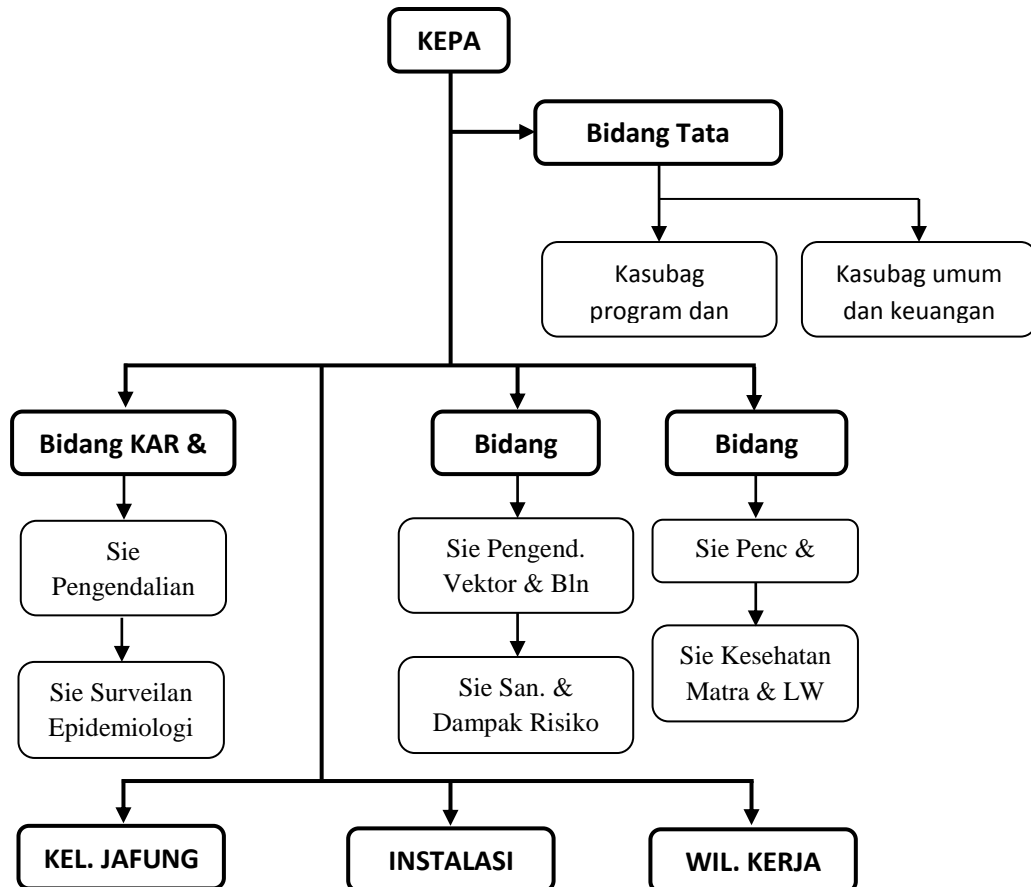
### **3.1.2 Misi**

- a. Membuat Program/ Perencanaan serta melakukan koordinasi dan integrasi dalam rangka melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina.
- b. Membuat Program/ perencanaan yang baik dalam rangka meningkatkan Surveilans Epidemiologi di pelabuhan beserta alat angkut dan muatannya dalam rangka cegah tangkal dan respon cepat terhadap penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit karantina dan penyakit potensial wabah dan bencana.
- c. Membuat Program /perencanaan serta meningkatkan koordinasi guna peningkatan pengawasan keluar masuk obat, makanan-minuman, alat kesehatan (OMKBA).
- d. Membuat Program untuk mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan untuk hidup sehat.
- e. Membuat perencanaan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penerbitan dokumen kesehatan yang berkaitan dengan lalu lintas internasional di pelabuhan.
- f. Mengoptimalkan jejaring kerja sistem kesehatan nasional dan internasional.



### 3.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan PERMENKES 356/MENKES/PER/IV/2008 yang telah diubah menjadi PERMENKES 2348/MENKES/PER/XI/2011

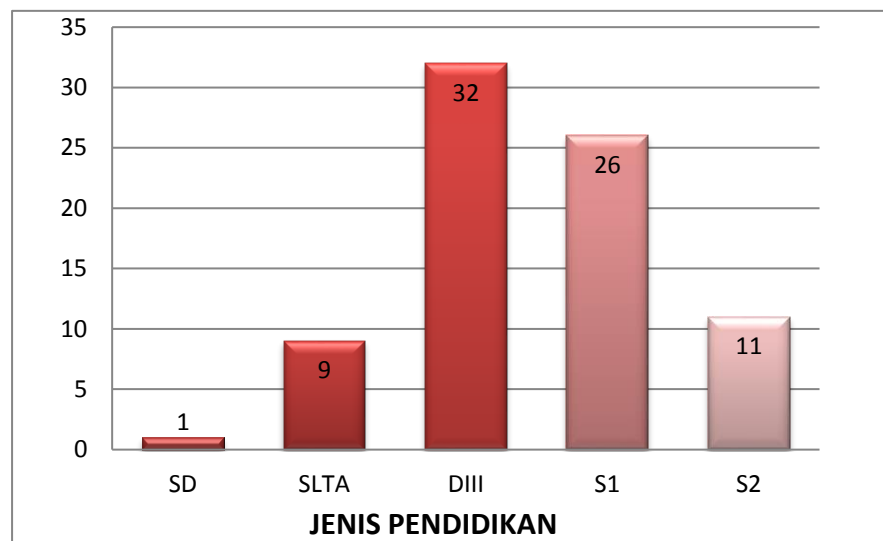


Gambar 3.1 Struktur organisasi KKP Kelas I Batam  
Sumber : Profil KKP Kelas I Batam 2014

KKP Kelas I Batam memiliki jumlah pegawai sebanyak 79 orang dengan rincian sebagai berikut:

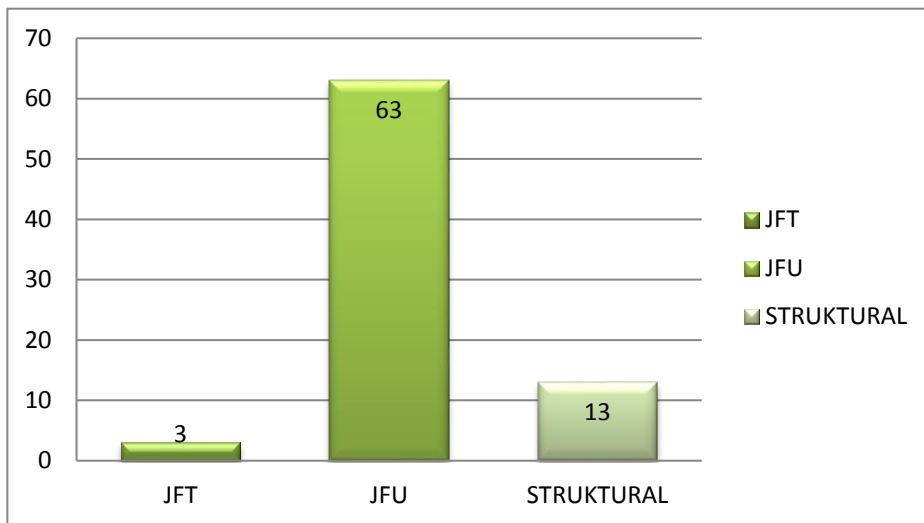
- a. Golongan I sebanyak 1 orang
- b. Golongan II sebanyak 25 orang
- c. Golongan III sebanyak 47 orang
- d. Golongan IV sebanyak 6 orang

Tingkat pendidikan pegawai di KKP Kelas I Batam masih terbanyak adalah DIII, selanjutnya adalah S1. Tingkat pendidikan tertinggi pegawai KKP Kelas I Batam adalah S2 dan masih ada pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SD. Adapun secara grafik distribusi tingkat pendidikan di KKP Kelas I Batam dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Distribusi tingkat pendidikan pegawai KKP Kelas I Batam  
*Sumber : Profil KKP Kelas I Batam 2014*

Distribusi klasifikasi jabatan pegawai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam ada 3 jenis jabatan yaitu jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, dan jabatan struktural. Masing-masing jabatan tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Adapun distribusi klasifikasi jabatan dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3 Distribusi golongan jabatan pegawai KKP Kelas I Batam  
 Sumber : Profil KKP Kelas I Batam, 2014

Sarana gedung, kantor dan rumah dinas KKP Kelas I Batam termasuk dalam kategori lengkap, walaupun ada keluhan kantor utama belum sesuai standar untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I. Adapun data tentang sarana gedung, kant dan rumah dinas KKP Kelas I Batam dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Sarana gedung, kantor dan rumah dinas KKP Kelas I Batam

No	Tanah/ Bangunan	Luas (m <sup>3</sup> )	Jumlah	Keterangan
1	Kantor induk	1221	1	Batu Ampar
2	Kantor wilker	70	1	Kabil
3	Gedung karantina	1768	1	Batu Ampar
4	Rumah dinas	751	2	Sekupang
5	Rumah dinas	600	4	Baloi
6	Rumah dinas	200	1	Baloi

Sumber: Profil KKP Kelas I Batam, 2014

Untuk menunjang kegiatan dan mobilitas di KKP Kelas I Batam maka diperlukan adanya kendaraan yang layak pakai. Secara umum kendaraan yang di miliki oleh KKP Kelas I Batam sudah memenuhi untuk menunjang kegiatan yang ada di KKP Kelas I Batam. Adapun

jumlah kendaraan yang ada di KKP Kelas I Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah Kendaraan KKP Kelas I Batam

No	Jenis	Unit	Keterangan
1	Minibus	5	3 baik, 2 rusak
2	Sedan	1	Baik
3	Bus	1	Baik
4	Ambulans	6	5 baik, 1 rusak
5	Pick up	1	Baik
6	Perahu karet	1	Rusak
7	Bus Rontgen	1	Baik

Sumber: Profil KKP Kelas I Batam, 2014

Setiap tahun KKP Kelas I Batam mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, dan anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tabel 3.3 memperlihatkan rincian anggaran KKP Kelas I Batam dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Untuk rincian belanja masing-masing alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.3 Anggaran KKP Kelas I Batam tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
2010	2.809.756.000	5.012.582.000	253.000.000	8.075.347.000
2011	3.180.692.000	4.524.548.000	656.635.000	8.361.875.000
2012	4.381.569.000	5.161.824.000	403.364.000	9.946.757.000
2013	4.433.144.000	9.858.040.000	1.832.224.000	16.123.408.000
2014	4.800.150.000	6.595.085.000	468.964.000	11.864.199.000

Sumber: Profil KKP Kelas I Batam, 2014

Tabel 3.4 Persentase Pembelanjaan Anggaran KKP Kelas I Batam tahun 2010-2014

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>
2010	35%	62%	3%	100%
2011	38%	54%	8%	100%
2012	44%	52%	4%	100%
2013	27%	61%	12%	100%
2014	40%	56%	4%	100%

Sumber: Profil KKP Kelas I Batam, 2014

#### 3.1.4 Strategi

KKP Kelas I Batam memiliki strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Advokasi dan sosialisasi kepada stake holder
- b. Promosi dan KIE terhadap masyarakat pelabuhan
- c. Jejaring kerja dan kemitraan secara horisontal dan vertikal

#### 3.1.5 Landasan hukum

- a. IHR 2005 → Revisi IHR 1969
- b. UU 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut
- c. UU 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara
- d. UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- e. UU 3 tahun 2009 tentang Kesehatan
- f. UU 21 tahun 1992 tentang pelayaran
- g. UU 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. PP 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- i. PP 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan
- j. PP 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
- k. PP 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
- l. Kepres 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata

- m. Kepmenkes 1372 tahun 2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa Flu Burung
- n. Kepmenkes 1575 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- o. Permenkes 356/2008 → 2348/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP
- p. Kepmenkes 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
- q. Kepmenkes 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
- r. Kepmenkes 1116 tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
- s. Kep. Dirjen PPM & PL 451 tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- t. Kepmenkes 340 tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL
- u. Permenkes 560 tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah
- v. Permenkes 175 tahun 1977 tentang Bentuk Isi dan Tata Cara Penerbitan DC/DEC bagi Kapal
- w. Permenkes 597 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Permenkes 294 tahun 1978 tentang Pemberian ICV

### **3.3 Wilayah Kerja Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam**

Wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam terdiri dari:

- a. Pelabuhan Laut Batu Ampar sebagai KKP induk

b. Bandara Internasional Hang Nadim

Fasilitas yang terdapat di bandara tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *body cleaner*, *desktop computer*, jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas pesawat pada tahun 2014 di bandara Internasional Hang Nadim sebanyak 16.553 kedatangan, dan 16.727 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 2.397.099 kedatangan, dan 2.486.569 keberangkatan.

c. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *body cleaner*, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, serta radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Internasional Sekupang sebanyak 11.968 kedatangan, dan 11.985 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 509.993 kedatangan, dan 437.658 keberangkatan.

d. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Domestik Sekupang sebanyak 9.200 kedatangan, dan 9.314 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 607.016 kedatangan, dan 619.902 keberangkatan.

e. Pelabuhan Laut Pulau Sambu

Pelabuhan Laut Pulau Sambu merupakan cikal bakal dibentuknya KKP di Batam. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Pulau Sambu sebanyak 312 kedatangan, dan 312 keberangkatan.

f. Pelabuhan Laut Nongsa

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di

Pelabuhan Laut Domestik Nongsa sebanyak 7.248 kedatangan, dan 8.084 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 585.806 kedatangan, dan 534.429 keberangkatan.

g. Pelabuhan Laut Kabil

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi.

h. Pelabuhan Laut Telaga Punggur

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Kabil dan Telaga Punggur sebanyak 19.390 kedatangan, dan 19.459 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 726.605 kedatangan, dan 723.577 keberangkatan.

i. Pelabuhan Laut Ferry Batam Center

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *body cleaner*, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Ferry Batam Center sebanyak 21.559 kedatangan, dan 21.562 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 1.593.361 kedatangan, dan 1.699.932 keberangkatan.

j. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung

k. Pelabuhan Laut Teluk Senimba

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Teluk Senimba sebanyak 2.364 kedatangan, dan 2.644 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2014 sebanyak 33.350 kedatangan, dan 1.189 keberangkatan.



### 1. Pelabuhan Laut Semblog (Sembawang Logistik)

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2014 di Pelabuhan Laut Semblog sebanyak 662 kedatangan, dan 648 keberangkatan.

### m. Pelabuhan Laut *Ferry Harbour Bay*

Fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut berupa klinik terbatas, *thermal scanner*, *body cleaner*, *desktop computer*, aplikasi *online* dan jaringan internet, dan radio komunikasi. Jumlah lalu lintas kapal pada tahun 2013 di Pelabuhan Laut Ferry Batam Center sebanyak 8.218 kedatangan, dan 8.423 keberangkatan. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2013 sebanyak 630.276 kedatangan, dan 643.980 keberangkatan.

Gambar 3.3 Peta Wilayah Kerja KKP Kelas I Batam



Sumber : Profil KKP Kelas I Batam 2014

## 3.4 Program Kerja Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam

### 3.4.1 Tugas pokok

Sesuai dengan PERMENKES 356/MENKES/PER/IV/2008 yang telah diubah menjadi PERMENKES 2348/MENKES/PER/XI/2011

yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.

### **3.4.2 Fungsi**

- a. Pelaksanaan Kekarantinaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif ( OMKABA ) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

### **3.4.3 Pengawasan kekarantinaan**

Pengawasan kekarantinaan menurut UU karantina no 1 dan 2 tahun 1962 meliputi Plaque ( Pes ), Cholera, Yellow Fever, Smallpox, Louse Borne Typhus, Louse Borne Relapsing Fever. Sedangkan menurut IHR tahun 1969 dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu penyakit karantina (plaque, yellow fever, cholera), emerging disease (AIDS, DHF, dll), dan new emerging disease (SARS, Avian Flue, Ebola, dll). dan menurut IHR tahun 2005 pengawasan kekarantinaan berdasarkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Secara Operasional Penyelenggaraan identifikasi faktor risiko penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, meliputi :

- a. Alat angkut (kapal laut, pesawat)
- b. Muatan, yang terdiri dari crew, penumpang, dan barang (Omka)
- c. Lingkungan (pelabuhan dan bandara)

### **3.4.4 Pemeriksaan dan pengamatan**

- a. Dokumen
  - 1) maritime declaration of health
  - 2) SSCEC/ SCC
  - 3) Health book

- 4) List port of call
  - 5) Free pratique
  - 6) Certificate of medicine/ p3k
  - 7) Port health clearance
- b. Penumpang dan crew
- 1) international certificate vaccination dan profilaksis
  - 2) health certificate (crew)
  - 3) pemeriksaan dan pengobatan, rujukan
  - 4) surat ijin mengangkut orang sakit
  - 5) allert card
- c. Barang meliputi obat, makanan, kosmetik dan alkes (omka)
- 1) fisik
  - 2) Laboratorium
  - 3) Rujukan BPOM
  - 4) Manifest
  - 5) Surat keterangan
  - 6) Surat ijin mengangkut jenazah
- d. Lingkungan
- 1) vektor (tikus, kecoa, lalat, dll)
  - 2) kualitas air
  - 3) limbah
  - 4) komunitas pelabuhan dan bandara
- e. Upaya kesehatan pelabuhan dan lintas wilayah
- 1) kesehatan haji dan umroh
  - 2) kesehatan kerja
  - 3) kesehatan matra
  - 4) pelayanan kesehatan terbatas
  - 5) pelayanan rujukan

#### **3.4.5 Proses Karantina alat angkut**

Proses karantina alat angkut di mulai ketika terdapat kedatangan kapal dari luar negeri di suatu pelabuhan, maka kapal tersebut

diharuskan untuk mengibarkan bendera warna kuning. Kemudian akan datang 1 tim petugas karantina yang akan memeriksa kapal tersebut, yang terdiri dari petugas medis dan petugas sanitasi. Jika kapal tersebut terindikasi terdapat penyakit yang termasuk dalam penyakit karantina, maka kapal tersebut dilarang bersandar dan harus menunggu sampai proses karantina selesai. Namun jika kapal tersebut bebas dari penyakit karantina, maka akan diberikan ijin untuk bersandar di pelabuhan dengan diberikannya *Certificate of Pratique*.

#### **3.4.6 Instalasi penunjang**

KKP Kelas I Batam memiliki beberapa instalasi tambahan sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari KKP sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Instalasi Klinik

Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, pelayanan vaksinasi internasional, pengawasan kesehatan bagi pelaksana tindakan penyehatan pada alat angkut.

b. Instalasi Farmasi

Membuat Perencanaan Pengadaan Obat dan Alkes, Mendistribusikan Obat dan Alkes, Melaksanakan Peracikan Obat, Membuat Laporan Pemakaian

c. Instalasi Data dan informasi

Melakukan kegiatan teknis dan administratif dalam bidang Data dan Informasi, melaksanakan kegiatan dalam rangka kelancaran arus komunikasi, data dan informasi, Melakukan pemeriksaan operasional sarana prasarana data, server, software, dan peralatan pendukung lainnya, melakukan perekaman kehadiran pegawai secara elektronik dan membuat laporan Informasi akumulasi kehadiran pegawai, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Instalasi Data dan Informasi secara berkala.

### **3.5 Program Kerja Unggulan Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam**

Program kerja di KKP Kelas I Batam secara umum sama dengan KKP Kelas I lainnya seluruh wilayah Indonesia. Yang membedakannya adalah dari segi tingginya mobilitas atau lalu lintas alat angkut baik barang maupun manusia yang masuk melalui KKP Kelas I Batam. Dengan tingginya lalu lintas tersebut, maka risiko masuk dan tersebarnya penyakit karantina akan semakin tinggi juga. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya lebih dalam melakukan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap lalu lintas alat angkut, tentunya dengan ditunjang dengan petugas karantina yang terampil dan cekatan serta teknologi yang lebih canggih dan modern dalam mendeteksi adanya penyakit karantina.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sangat konsen terhadap pengendalian vektor di tempat-tempat umum seperti bandara dan pelabuhan. Sehingga seluruh bandara dan pelabuhan diwilayah kerjanya menjadi tempat yang bebas vektor penyakit. Upaya yang dilakukan adalah dengan kerja sama dengan lintas sektoral, dan pengawasan secara terus menerus.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Kegiatan karantina mulai dilakukan setelah penyakit Pes mulai memasuki negara Indonesia pada tahun 1911 melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
- b. Tugas Pokok KKP Kelas I Batam yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara.
- c. Wilayah kerja KKP Kelas I Batam mempunyai 12 yaitu Pelabuhan Laut Batu Ampar sebagai KKP induk, Pelabuhan Laut Internasional Sekupang, Pelabuhan Laut Pulau Sambu, Pelabuhan Laut Domestik Sekupang, pelabuhan laut dan satu bandara udara, Pelabuhan Laut Nongsa, Pelabuhan Laut Kabil, Pelabuhan Laut Telaga Punggur, Pelabuhan Laut Ferry Batam Center, Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung, Pelabuhan Laut Teluk Senimba, Pelabuhan Laut Semblog (Sembawang Logistik), Pelabuhan Laut *Ferry Harbour Bay*. Satu bandara udara Internasional Hang Nadim.
- d. Program unggulan KKP Kelas I Batam adalah pengendalian vector di tempat-tempat umum (bandara, asrama haji dan pelabuhan)

#### **4.2 Saran**

Waktu yang di alokasikan untuk kunjungan lapangan tidak lama, sehingga peserta tidak bisa melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan KKP di wilayah kerjanya. Untuk kegiatan serupa sebaiknya di alokasikan waktu

yang lebih lama sehingga peserta dapat secara langsung mengikuti kegiatan KKP dilapangan atau wilayah kerja mereka.